

MAKALAH

SEJARAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA MULAI DARI PERIODE PROKLAMASI SD DEMOKRASI TERPIMPIN

MATA KULIAH : SIM PROKLAMASI S/D DEMOKRASI TERPIMPIN
DOSEN PENGAMPU : SUMIYATI, M.Pd



DISUSUN OLEH

SARIA TUNNISA

PRODI : PENDIDIKAN SEJARAH
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP YAPIS DOMPU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "**Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia: Dari Periode Proklamasi hingga Demokrasi Terpimpin**". Makalah ini disusun sebagai bentuk kajian historis untuk memahami perjalanan bangsa Indonesia dalam membangun sistem kenegaraan dan pemerintahan setelah kemerdekaan.

Melalui pembahasan dari periode Proklamasi 1945, masa Revolusi Fisik, Demokrasi Liberal, hingga Demokrasi Terpimpin, penulis berupaya menghadirkan gambaran menyeluruh mengenai tantangan, dinamika politik, dan strategi yang ditempuh oleh para pendiri bangsa dalam mempertahankan serta mengisi kemerdekaan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan, khususnya bagi para pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang sejarah politik Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan	2
BAB II. PEMBAHASAN	3
A. Masa proklamasi dan revolusi fisik (1945–1949)	
B. Masa demokrasi liberal (1950–1959)	
C. Masa demokrasi terpimpin (1959–1965)	
BAB III. PENUTUP	13
A. KESIMPULAN.	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah yang menandai lahirnya negara baru yang berdaulat setelah lebih dari tiga abad dijajah oleh bangsa asing. Peristiwa monumental ini merupakan puncak dari perjuangan panjang rakyat Indonesia yang melibatkan pengorbanan jiwa, raga, dan semangat kebangsaan yang tak tergoyahkan. Namun, kemerdekaan tersebut bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam menata sistem kenegaraan dan membangun identitas nasional.

Periode pasca-proklamasi merupakan masa transisi yang penuh gejolak. Dalam rentang tahun 1945 hingga 1965, Indonesia mengalami dinamika politik yang sangat kompleks, mulai dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam Revolusi Fisik (1945–1949), transisi menuju sistem Demokrasi Liberal (1950–1959), hingga konsolidasi kekuasaan melalui Demokrasi Terpimpin (1959–1965). Ketiga periode ini memainkan peran penting dalam membentuk arah sejarah dan struktur politik Indonesia.

Pada masa Revolusi Fisik, Indonesia harus menghadapi ancaman dari kembalinya kekuatan kolonial Belanda yang berusaha merebut kembali kekuasaan melalui agresi militer. Konflik bersenjata ini disertai dengan diplomasi internasional, yang berpuncak pada Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, di mana Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara *de jure* (Notosusanto, 1995). Perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini memperlihatkan semangat dan tekad bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri dan mengatur masa depannya.

Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia mencoba menerapkan sistem pemerintahan demokrasi parlementer dengan semangat kebebasan politik melalui Demokrasi Liberal. Namun, kenyataan politik saat itu tidak seindah harapan. Fragmentasi partai politik yang sangat tinggi, lemahnya sistem koalisi, serta seringnya pergantian kabinet membuat pemerintahan tidak stabil dan tidak efektif (Ismail, 2013). Meski Pemilu 1955 sebagai pemilu pertama dianggap sebagai pencapaian besar dalam demokrasi, namun kegagalan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar baru menimbulkan kekecewaan mendalam terhadap sistem tersebut.

Ketidakpuasan terhadap sistem demokrasi parlementer membuka jalan bagi Presiden Soekarno untuk mengambil alih kendali pemerintahan secara lebih kuat. Melalui Dekrit

Presiden 5 Juli 1959, Soekarno membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945, yang menandai berakhirnya era Demokrasi Liberal dan dimulainya era Demokrasi Terpimpin. Dalam sistem ini, Presiden Soekarno memposisikan diri sebagai pusat kekuasaan negara, serta mengusung konsep ideologis *Nasakom* (Nasionalisme, Agama, Komunisme) sebagai dasar kebijakan politik nasional (Lubis, 2010).

Masa Demokrasi Terpimpin mencerminkan usaha negara dalam menjaga stabilitas dan persatuan nasional di tengah tantangan besar, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, sistem ini juga menyimpan berbagai persoalan, seperti pembatasan kebebasan politik, dominasi eksekutif, dan ketimpangan ekonomi. Selain itu, meningkatnya peran militer dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam pemerintahan menjadi faktor pemicu konflik politik yang berujung pada ketegangan nasional menjelang 1965.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji perjalanan sejarah Indonesia dari masa proklamasi hingga Demokrasi Terpimpin secara mendalam. Kajian ini tidak hanya memberikan pemahaman historis terhadap fase-fase penting pembentukan bangsa, tetapi juga menjadi refleksi terhadap proses pendewasaan demokrasi Indonesia. Dengan memahami masa lalu secara kritis dan objektif, generasi masa kini dapat belajar dari keberhasilan dan kegagalan masa lalu sebagai bekal membangun masa depan bangsa yang lebih adil, demokratis, dan berkeadaban.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Masa proklamasi dan revolusi fisik (1945–1949) ?
2. Bagaimana Masa demokrasi liberal (1950–1959) ?
3. Bagaimana Masa demokrasi terpimpin (1959–1965)?

C. TUJUAN

1. Untuk mengetahui Bagaimana Masa proklamasi dan revolusi fisik (1945–1949)
2. Untuk mengetahui Bagaimana Masa demokrasi liberal (1950–1959)
3. Untuk mengetahui Bagaimana Masa demokrasi terpimpin (1959–1965)

BAB II

PEMBAHASAN

A. MASA PROKLAMASI DAN REVOLUSI FISIK (1945–1949)

1. Latar Belakang Proklamasi

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945 menjadi momen krusial bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Kekosongan kekuasaan yang terjadi di Indonesia akibat kekalahan Jepang menjadi peluang emas bagi para pejuang kemerdekaan untuk mendeklarasikan kemerdekaan tanpa campur tangan pihak asing.

Golongan tua seperti Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta mengedepankan pendekatan diplomasi dalam proses proklamasi, sementara golongan muda seperti Sutan Sjahrir dan Wikana menuntut agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa menunggu keputusan Jepang. Setelah peristiwa Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta akhirnya menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta (Notosusanto, 1995).

2. Perumusan Dasar Negara dan Konstitusi

Satu hari setelah proklamasi, tepatnya pada 18 Agustus 1945, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara, memilih Soekarno sebagai Presiden, dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Konstitusi ini menjadi landasan formal berdirinya negara Republik Indonesia dan menjadi titik awal pembentukan institusi pemerintahan yang sah secara hukum (Ismail, 2013).

3. Pembentukan Pemerintahan Awal

Pemerintah segera membentuk struktur pemerintahan darurat yang terdiri atas kementerian dan lembaga negara. Dalam waktu singkat, Republik Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial dan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai lembaga legislatif sementara. Meski dalam kondisi serba terbatas dan darurat, pemerintah Indonesia tetap berupaya menjalankan roda pemerintahan dan diplomasi (Taufik, 2014).

4. Tantangan dari Sekutu dan Kembalinya Belanda

Meskipun telah memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia belum mendapatkan pengakuan internasional, terutama dari negara-negara besar dan pihak Sekutu. Kedatangan pasukan Sekutu (AFNEI) yang diboncengi NICA (Nederlandsch-Indische Civiele Administratie) menimbulkan konflik karena Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia. Akibatnya, terjadi berbagai pertempuran antara rakyat Indonesia dan pasukan Sekutu-

Belanda, seperti Pertempuran Surabaya (10 November 1945), Bandung Lautan Api, dan Medan Area.

Pertempuran Surabaya adalah salah satu simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap upaya penjajahan kembali. Insiden ini menewaskan ribuan pejuang dan warga sipil, tetapi memperkuat semangat nasionalisme rakyat Indonesia (Lubis, 2010).

5. Revolusi Fisik dan Perjuangan Diplomatik

Periode 1945–1949 dikenal sebagai masa revolusi fisik karena rakyat Indonesia di berbagai wilayah melakukan perlawanan bersenjata terhadap agresi militer Belanda. Dua agresi militer besar dilakukan Belanda, yaitu Agresi Militer I (21 Juli 1947) dan Agresi Militer II (19 Desember 1948). Agresi tersebut dilancarkan untuk merebut kembali wilayah Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaan.

Namun perjuangan Indonesia tidak hanya melalui senjata, tetapi juga melalui jalur diplomasi. Upaya diplomasi dilakukan melalui Komite Tiga Negara (KTN), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Konferensi Meja Bundar (KMB). Puncaknya adalah penandatanganan hasil KMB di Den Haag pada 27 Desember 1949, di mana Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia, kecuali atas wilayah Irian Barat yang masih menjadi sengketa (Mulyana, 2008).

6. Peneguhan Kedaulatan

Dengan pengakuan kedaulatan oleh Belanda, Indonesia kemudian menjadi negara yang berdaulat penuh. Namun tantangan masih terus hadir dalam bentuk pemberontakan, konflik internal, dan pembangunan bangsa yang baru merdeka. Masa revolusi fisik ini menjadi fondasi penting bagi terbentuknya identitas nasional dan pengakuan dunia terhadap eksistensi Republik Indonesia.

B. MASA DEMOKRASI LIBERAL (1950–1959)

1. Latar Belakang dan Peralihan Sistem Pemerintahan

Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949, Indonesia berubah bentuk menjadi negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun, sistem federal ini tidak mendapatkan dukungan luas dari rakyat karena dianggap sebagai warisan politik pecah-belah Belanda (*devide et impera*). Dalam waktu kurang dari setahun, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1950 (Notosusanto, 1995).

Bersamaan dengan perubahan bentuk negara, sistem pemerintahan Indonesia pun berubah dari presidensial menjadi parlementer. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif

dipegang oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen (DPR), bukan langsung kepada presiden. Hal inilah yang menandai dimulainya masa Demokrasi Liberal.

2. Ciri-Ciri Demokrasi Liberal di Indonesia

Masa Demokrasi Liberal dicirikan oleh dominasi partai politik, sistem pemerintahan parlementer, dan kebebasan pers serta berpendapat yang cukup luas. Kabinet sering berganti karena lemahnya koalisi partai dalam parlemen, dan ini menyebabkan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan.

Dalam periode 1950–1959, tercatat ada tujuh kali pergantian kabinet yang dipimpin oleh tokoh-tokoh berbeda, antara lain:

- Kabinet Natsir (1950–1951),
- Kabinet Sukiman (1951–1952),
- Kabinet Wilopo (1952–1953),
- Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953–1955),
- Kabinet Burhanuddin Harahap (1955–1956),
- Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956–1957),
- Kabinet Djuanda (1957–1959) (Ismail, 2013).

Kondisi ini memperlihatkan lemahnya sistem parlementer di Indonesia karena banyaknya konflik internal antarpolisi dan seringnya terjadi tarik-menarik kepentingan.

3. Pemilu Pertama dan Upaya Demokratisasi

Meskipun penuh dinamika, masa Demokrasi Liberal juga mencatat kemajuan penting, yaitu diselenggarakannya Pemilihan Umum pertama tahun 1955. Pemilu ini dianggap sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia hingga kini. Pemilu 1955 terdiri dari dua tahap:

- Pemilu anggota DPR (29 September 1955),
- Pemilu anggota Konstituante (15 Desember 1955) (Mulyana, 2008).

Pemilu 1955 diikuti oleh 172 partai dan organisasi peserta. Hasil pemilu menunjukkan dominasi empat kekuatan politik besar: Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sayangnya, setelah terpilih, Konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru yang seharusnya menggantikan UUD Sementara 1950.

4. Ketegangan Politik dan Ketidakstabilan Nasional

Kegagalan Konstituante menyusun UUD baru menjadi titik balik penting. Perdebatan ideologis antara kelompok nasionalis, Islamis, dan komunis membuat sidang-sidang

Konstituante tidak mencapai mufakat, terutama soal dasar negara antara Pancasila atau Islam sebagai ideologi negara.

Di sisi lain, ketidakstabilan politik diperparah oleh konflik regional, seperti gerakan separatis PRRI/Permesta yang muncul di Sumatera dan Sulawesi pada tahun 1958 akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Ketegangan sosial-politik ini menunjukkan lemahnya kontrol pusat dan tidak mampunya sistem parlementer mengakomodasi kepentingan nasional secara utuh (Lubis, 2010).

5. Akhir Masa Demokrasi Liberal

Puncak krisis terjadi ketika Presiden Soekarno menilai bahwa sistem Demokrasi Liberal gagal mewujudkan stabilitas nasional dan pembangunan. Maka, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945 serta mengakhiri Demokrasi Liberal. Dekrit ini sekaligus menjadi titik awal diberlakukannya sistem Demokrasi Terpimpin.

Masa Demokrasi Liberal merupakan periode penting dalam sejarah demokrasi Indonesia karena membuka ruang kebebasan politik yang luas. Namun, kelemahan sistem parlementer, seringnya pergantian kabinet, konflik ideologis, dan pemberontakan daerah menunjukkan bahwa demokrasi tanpa stabilitas politik dan konsensus nasional sulit bertahan. Periode ini memberikan pelajaran penting bahwa sistem politik harus sesuai dengan kondisi sosial dan budaya bangsa.

C. MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959–1965)

1. Latar Belakang Pemberlakuan Demokrasi Terpimpin

Kegagalan Konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru pasca Pemilu 1955, serta kondisi politik yang semakin tidak stabil, mendorong Presiden Soekarno untuk mengambil tindakan tegas. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan menyatakan berlakunya kembali UUD 1945, menggantikan UUD Sementara 1950. Langkah ini sekaligus mengakhiri masa Demokrasi Liberal dan memulai periode Demokrasi Terpimpin (Notosusanto, 1995).

Dekrit ini disambut dukungan luas, terutama dari Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jenderal A.H. Nasution, karena dianggap sebagai jalan keluar dari kekacauan politik. Namun, dalam pelaksanaannya, Demokrasi Terpimpin justru memperkuat kekuasaan eksekutif dan mengikis prinsip-prinsip demokrasi.

2. Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin

Sesuai dengan namanya, Demokrasi Terpimpin menempatkan presiden sebagai pemimpin utama dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun ciri-cirinya antara lain:

- Kekuatan eksekutif (Presiden) menjadi dominan dan cenderung otoriter.
- Peran partai politik dikurangi; banyak partai dibubarkan atau dilebur.
- MPR dan DPR dibentuk bukan melalui pemilu, melainkan melalui penunjukan.
- Media dikontrol ketat, dan kebebasan berpendapat dibatasi.
- TNI (khususnya Angkatan Darat) memainkan peran politik yang besar.

Soekarno memperkenalkan konsep *Nasakom* (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) sebagai dasar integrasi politik untuk menyatukan berbagai kekuatan politik seperti PNI, NU, dan PKI (Ismail, 2013). Namun, penerapan Nasakom ini justru menimbulkan ketegangan, terutama antara militer dan PKI yang semakin kuat.

3. Kebijakan Politik dan Ekonomi

Dalam masa ini, Soekarno menerapkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada anti-imperialisme dan konfrontasi terhadap kekuatan asing, terutama Barat. Beberapa kebijakan penting antara lain:

- Politik luar negeri bebas aktif digeser ke arah “anti-nekolim” (neokolonialisme dan imperialisme).
- Konfrontasi dengan Malaysia tahun 1963 yang dikenal dengan *Ganyang Malaysia*.
- Penarikan Indonesia dari keanggotaan PBB pada 1965 sebagai bentuk protes atas Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB (Mulyana, 2008).

Dalam bidang ekonomi, kondisi Indonesia sangat buruk. Inflasi mencapai lebih dari 600% per tahun, harga kebutuhan pokok melonjak, dan nilai rupiah anjlok. Pemerintah gagal mengendalikan krisis ekonomi yang diperparah oleh kebijakan ekonomi yang tidak terencana dan terlalu berorientasi pada proyek-proyek mercusuar seperti pembangunan Monumen Nasional (Monas) dan Gelora Bung Karno (Lubis, 2010).

4. Peran Militer dan PKI

Salah satu ciri utama Demokrasi Terpimpin adalah semakin kuatnya pengaruh militer dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Presiden Soekarno memberikan ruang besar kepada PKI dalam struktur pemerintahan dan organisasi rakyat. Sebaliknya, militer – terutama Angkatan Darat – merasa terancam oleh kebangkitan PKI dan mulai mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi pengaruh komunisme yang meluas.

Konflik ideologis antara kelompok nasionalis, komunis, dan militer terus meningkat. Situasi ini menciptakan suasana politik yang tegang dan penuh kecurigaan, yang menjadi latar belakang penting menjelang peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965.

5. Runtuhnya Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin berakhir secara de facto setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI). Peristiwa ini ditandai dengan penculikan dan pembunuhan enam jenderal TNI AD. TNI AD, yang dipimpin oleh Mayjen Soeharto, segera mengambil alih kendali keamanan dan melancarkan operasi pemulihan.

Dalam waktu singkat, PKI dinyatakan sebagai dalang kudeta dan kemudian dibubarkan serta dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Presiden Soekarno kehilangan dukungan politik dan militer. Pada tahun 1966, Soeharto memperoleh Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang memberinya wewenang untuk mengendalikan keamanan dan pemerintahan. Ini menandai awal berakhirnya Demokrasi Terpimpin dan transisi menuju Orde Baru (Sundha, 2011).

Masa Demokrasi Terpimpin merupakan eksperimen politik Soekarno yang bermaksud mempersatukan bangsa dalam satu arah kepemimpinan yang kuat. Namun, penyimpangan terhadap prinsip demokrasi, buruknya kondisi ekonomi, serta konflik ideologi antara PKI dan militer membuat sistem ini tidak mampu bertahan. Akhir dari Demokrasi Terpimpin juga menandai berakhirnya kepemimpinan Soekarno dan munculnya rezim Orde Baru di bawah Soeharto.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia dari masa proklamasi hingga Demokrasi Terpimpin merupakan fase penting dalam proses pembentukan identitas dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dimulai dari masa Proklamasi dan Revolusi Fisik (1945–1949), bangsa Indonesia menunjukkan tekad kuat mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan diplomatik dan bersenjata menghadapi agresi militer Belanda. Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah yang menyatukan semangat nasionalisme rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan negara.

Selanjutnya, pada masa Demokrasi Liberal (1950–1959), Indonesia mencoba menjalankan sistem parlementer dengan menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan kebebasan politik. Meskipun Pemilu 1955 merupakan keberhasilan besar, namun lemahnya koalisi partai politik, seringnya pergantian kabinet, dan kegagalan Konstituante dalam menyusun UUD baru menyebabkan ketidakstabilan politik nasional.

Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965) lahir melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD 1945 dan memperkuat posisi Presiden Soekarno sebagai pemegang kekuasaan utama. Namun, dominasi eksekutif, naiknya pengaruh PKI, konflik ideologis, serta keterpurukan ekonomi menyebabkan sistem ini justru menjauh dari nilai-nilai demokrasi. Masa ini berakhir tragis dengan peristiwa G30S/PKI yang menjadi titik balik munculnya Orde Baru.

Secara keseluruhan, periode 1945–1965 mencerminkan perjuangan Indonesia dalam mencari bentuk pemerintahan yang stabil dan sesuai dengan jati diri bangsa. Dinamika yang terjadi selama dua dekade ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya keseimbangan antara kekuasaan, demokrasi, dan stabilitas nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail, M. (2013). *Sejarah Indonesia Modern: Perkembangan Politik dan Pemerintahan dari Masa Kemerdekaan hingga Reformasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Lubis, M. (2010). *Krisis Ekonomi dan Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, A. (2008). *Demokrasi Parlementer di Indonesia: Pemilu 1955 dan Pergolakan Ideologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyana, A. (2008). *Politik Luar Negeri Indonesia di Era Demokrasi Terpimpin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Notosusanto, N. (1995). *Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sundha, T. (2011). *G30S/PKI dan Kejatuhan Orde Lama*. Jakarta: Kompas.